

**ARTIKULASI DAN AGREGASI KEPENTINGAN
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK**

(Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Kabupaten Padang Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik)

TESIS

OLEH

**SAMSON FAREDDY HASIBUAN
NPM. 111801087**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Artikulasi dan Agregasi Kepentingan dalam Kebijakan Publik
(Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten
Padang Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik)

Nama : Samson Fareddy Hasibuan

NPM : 111801087

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 20 Mei 2013

Nama : Samson Fareddy Hasibuan

NPM : 111801087



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Muaz Zul, SH, M.Hum
Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA
Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samson Fareddy Hasibuan
NPM : 111801087

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

“Artikulasi dan Agregasi Kepentingan dalam Kebijakan Publik (Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik)”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Mei 2013

Yang menyatakan,



Samson Fareddy Hasibuan

A B S T R A K

ARTIKULASI DAN AGREGASI KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik

N a m a : Samson Fareddy Hasibuan, NPM : 111801087

Terkait dengan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang dilakukan partai politik maka di Kabupaten Padang Lawas, fenomena keberadaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak terbentuknya Kabupaten Padang Lawas menjadi kajian menarik untuk dilihat peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan kepentingan masyarakat. Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki struktur organisasi sampai tingkat desa serta memiliki anggota legislatif sebanyak 3 (orang) dari 30 orang anggota DPRD di pemilu 2009 dan membentuk satu fraksi PPP tersendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan artikulasi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pola kebijakan pembangunan daerah dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan agregasi kepentingan masyarakat daerahnya. Teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah secara mendalam jumlah informan sebanyak 12 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan telah dijalankan dengan baik. Hal ini dilihat dari mekanisme pengaduan yang telah dilakukan, program-program yang dibutuhkan masyarakat terwakili dalam kebijakan partai melalui fraksi yang ada di DPRD, dan sedikitnya konflik yang berimbas pada kondisi internal partai dan di masyarakat. Dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi serta usulan yang disampaikan secara langsung oleh, maka telah dilaksanakan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara di Kecamatan Sosa Dan Batang Lubu Sutam, dengan tujuan untuk mengunjungi serta menemui langsung masyarakat Pemilih sesuai dengan Dapem masing-masing. Reses merupakan bagian dari pada tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas. Melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang dalam kesempatan periode I tahun 2012 ini dilaksanakan secara perorangan diharapkan akan dapat memaksimalkan jalannya fungsi pengawasan / control terhadap Kinerja dan Kebijakan Pemerintah Daerah / Eksekutif baik dalam pelaksanaan Program Pembangunan Sarana Fisik dan Non Fisik. Hubungan Artikulasi dan Agregasi kepentingan dalam Kebijakan Publik telah dilaksanakan baik oleh para pengurus partai, fraksi maupun di eksekutif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa keputusan kebijakan, antara lain: Perda No. 1 tentang APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 dalam kegiatan Bantuan Stimulant, Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik, Perda No. 1 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam kegiatan Bantuan Stimulant Rehabilitasi Gedung SD/MI.

Kata-kata kunci: Artikulasi dan Agregasi Kepentingan, Kebijakan Publik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah **“Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan Dalam Kebijakan Publik (Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik)”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. A. H. M. Ya' kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, beserta seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
7. Terimakasih pula semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Medan, Mei 2013

P e n u l i s

Samson Fareddy Hasibuan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	10
BAB II : Tinjauan Pustaka	
2.1. Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah.....	12
2.2. Peran Partai Politik Dalam Penentuan Kebijakan.....	17
2.3. Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Partai Politik.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian.....	28
3.2. Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Definisi Konsep.....	28
3.4. Informan Penelitian.....	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara.....	37
4.2. Kondisi Geografis Daerah.....	39
4.3. Jumlah Penduduk.....	40
4.4. Potensi Daerah.....	41
4.5. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	43
4.5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	45

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Analisa dan Pembahasan	50
5.2. Artikulasi dan agregasi kepentingan dalam kebijakan publik	52
5.3. Hubungan artikulasi dan agregasi kepentingan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara	62
5.4. Bentuk dan jenis Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas Utara	63
5.5. Mekanisme-mekanisme Artikulasi dan Agregasi.....	67
5.6. Hasil-Hasil Kebijakan Di Kabupaten Padang Lawas Utara	69
5.7. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara	71
 BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	76
6.2. Saran-saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perjalanan kepartaian di Indonesia maka saat ini mengalami proses degradasi yang sangat luar biasa. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik disebabkan terbudayanya sengketa internal partai menjelang pemilihan legislatif maupun konflik perebutan kepengurusan suatu partai di Indonesia menjadikan citra negatif tentang partai politik semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan ruang dan gerak partai terbatas hanya mencari konstituen (pemilih) sebesar-besarnya untuk kepentingan faksi (kelompok) yang ada di masing-masing partai. Jika dilihat pada masa ORBA proses yang terjadi di dalam partai politik dengan adanya *floating mass* yang mengakibatkan ruang partisipasi publik tertutup. Kondisi ini tidak berubah di era sekarang dimana masyarakat menjadi penonton dari keseluruhan proses politik yang ada. Keterlibatan masyarakat hanya sebagai pelengkap dari kebijakan-kebijakan publik yang ada saat ini. Hal ini tidak terlepas dari tidak berfungsinya partai politik dalam melakukan pembelajaran politik dan partisipasi masyarakat. Partai politik kembali terjebak dalam upaya menjaga agar *floating mass* yang selama ini hanya dijadikan tambang suara tetap. Padahal menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah :

“ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa sebagai pilar demokrasi partai politik sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui proses pemilu. Ketidakberfungsinya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi tentu menjadi kondisi yang memprihatikan bagi perkembangan demokratisasi di Indonesia. Fungsi-fungsi partai yang seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ternyata belum secara optimal berjalan. Hal ini menyebabkan komunikasi politik antara partai politik dengan masyarakat menjadi tersumbat. Tersumbatnya komunikasi politik tersebut menyebabkan artikulasi kepentingan masyarakat menjadi berjalan sendiri tanpa diiringi apa yang dilakukan partai politik. Padahal dari sisi lain partai politik mempunyai beberapa peran penting yang meliputi: a) memberikan jembatan institusional antara warga dengan pemerintah; b) mengolah dan menghasilkan kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh partai pemenang; c) menjadi wadah bagi proses kaderisasi dan seleksi politik untuk mengisi jabatan publik; dan d) sebagai wadah konflik, yakni wadah untuk mengatur dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Jika dilihat dari semua peran tersebut maka fungsi utama partai politik adalah mengatur hubungan antara rakyat dalam suatu sistem politik di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Almond, Gabriel dan Bingham Powell Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Boston MA: Little Brown and Co.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Benditt, Theodore M., *The Concept of Interest in Political Theory*, Political Theory No. 3, August 1975.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001.
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Gosh. B.N., *Scientific Method and Social Research*, Sterling Publishers Privated Limited, New Dehli, 1982.
- Huberman, Micahel A. dan Miles Matthew B., *Handbook of Qualitatif Research* ed. Denzin, Norman K dan Lincoln Yvonna S. Sage Publications, London 1994.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Nachmias, David dan Nachmias, Cava, *Research Methods in The Social Sciences*, St. Martin Press, New York, 1987.

- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sartori, Giovanni, *Parties and Party Systems*, Ner York: Cambridge University Press.
- Saiful, Arif, *Kegagalan Pendidikan Partai Politik*, Kompas, 3 November 2003.
- Schlozman, Kay Lehman dan John Tierney, *More of The Same: Washingthon Pressure Group Activity in a Decade of Change*, Journal of Politics, Vol 45, May, 1983.
- Sutopo, H.B, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teoritik dan Praktis*, Pusat Penelitian UNS, Surakarta, 1995.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, CV. Eka jaya, Jakarta, 2005.
- UU No. 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik*, CV. Eka jaya, Jakarta, 2003.
- UU No. 2 Tahun 2011 tentang *Partai Politik*, CV. Eka jaya, Jakarta, 2011.
- Perda No. 35 tahun 2011 tentang *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.